

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap budaya organisasi terhadap akuntansi publik merupakan suatu fenomena yang menyebabkan belum dapat terlaksananya *good governance*. Menurut Rivai & Mulyadi (2012) yang menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berperan penting dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengatur tentang bagaimana upaya pemerintah dalam merealisasikan pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka pengembangan serta pengaplikasian akuntansi publik sangat penting diterapkan sebagai alat untuk menerapkan transparansi dalam upaya terwujudnya akuntabilitas publik agar tercapai *good governance*. Selaras dengan Sudaryono (2017) mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan tata nilai yang disepakati dan dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi yang sifatnya dinamis serta mampu untuk meningkatkan produktivitas organisasi”. Oleh karena itu pemerintah dapat menciptakan budaya organisasi yang baik agar dapat terciptanya sifat yang menjadi pedoman bagi setiap anggota organisasi agar dapat meningkatkan produktivitas organisasi dan dapat melaksanakan akuntansi sektor publik yang baik dan dapat terciptanya *good governance*.

Pemerintah pun kurang melakukan perhatian dengan kompetensi aparatur daerah terhadap penerapan akuntansi publik menjadi faktor belum terciptanya *good*

governance. Kompetensi menurut Nawawi (2015) menyatakan bahwa manusia yang bekerja di suatu organisasi (disebut juga personal tenaga kerja atau karyawan) yang melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi keterampilan, pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Henry, F Noor (2015) kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan serta hasil dari penelitian dan pengalaman secara kualitatif dan kuantitatif di bidangnya, sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman. Di sisi lain, sangat sedikit sarjana akuntansi berkualitas yang tertarik mengembangkan profesinya di pemerintahan daerah. karena kompensasi yang rendah. Ketiga, belum diterapkannya secara penuh standar akuntansi keuangan publik yang baku, sebagai pedoman pembuatan laporan keuangan dan mekanisme pengendalian. Belum diterapkannya standar akuntansi secara penuh akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan pengauditan. Adapun menurut Yani Sukriah Siregar (2016) kompetensi ialah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur pemerintah daerah berupa pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Maka berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan atas keterampilan serta didukung oleh sikap kerja yang diperlukan untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya dalam tempat kerja pada situasi tertentu yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah. Oleh sebab itu aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kemampuan, keterampilan sikap atau perilaku agar dapat melaksanakan akuntansi publik dengan baik agar dapat terciptanya *good governance*.

Menurut Amelia Tebae, I dkk. (2016) akuntansi merupakan sistem akuntansi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Sedangkan

menurut Arfan & L, (2014) akuntansi didefinisikan sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, seta interpretasi dari hasil proses tersebut. Akuntansi publik sangat erat kaitannya dengan paradigma serta desentralisasi fiskal yang sedang berjalan saat ini. Otonomi daerah merupakan salah satu bagian dari reformasi sektor publik, oleh karena itu, otonomi daerah berkaitan dengan reformasi sektor publik. Otonomi daerah merupakan suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah Haris (2007). Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tonggak di mulainya otonomi daerah dan dilaksanakannya desentralisasi fiskal, tantangan yang sedang dihadapi akuntansi sektor publik yaitudalam hal menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memonitoring akuntabilitas pemerintah daerah yang mencakup akuntabilitas finansial, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik dan akuntabilitas kebijakan (Mahmudi, 2010).

Good governance merupakan konsep yang diharuskan untuk diterapkan di sektor publik terkhusus untuk pemerintah daerah. Sebagai penyelenggara otonomi daerah harusnya pemerintah daerah dapat menerapkan prinsip *good governance* pemerintah daerah diwajibkan untuk lebih cepat serta tanggap atau responsif. Menurut (Mardiasmo, 2009) menyatakan bahwa terdapat 9 (sembilan) karakteristik pelaksanaan *good governance*, tetapi terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh pemerintah daerah guna melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (1) penciptaan transparansi, (2) akuntabilitas publik, dan (3) *value for money (economy, efficiency, dan effectiveness)*. Ketiga hal ini saling berkaitan serta saling menunjang antar satu sama lain untuk tercapainya suatu keberhasilan jika diterapkannya konsep *good governance*.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintah di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional Sutedi, (2011). Pengertian *Good Governance* menurut Agoes, (2011), sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kerjanya. Sedangkan definisi tentang *Good Governance* adalah “*A set of rules that define the relationship between stakeholders, managers, creditors, the government, employes, and other internal and external shareholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.* Kutipan diatas dapat diartikan bahwa *Good Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan.

Cara-cara kotor diduga dilakukan oleh pemerintah kota (Pemkot) Lampung untuk memperoleh dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) yang nialinya mencapai Rp 149 miliar. Berdasarkan sumber *analisis.co.id* yang merupakan anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), terdapat data yang mengungkap modus yang dilakukan Pemkot Lampung dilakukan melalui sekretaris BPKAD Kota Bandar Lampung, “modusnya dengan pemberian fee oleh Skertaris BPKAD kota Bandar Lampung kepada dirjen bina keuangan daerah kementrian dalam negeri untuk menyetujui

Pemda Kota Bandar Lampung mendapatkan hutang PEN dari PT. SMI” tulis sumber *analisis.co.id* yang dikutip *Kantor Berita Politik RMOL* pada Rabu (29/12/2021). Dijelaskan bahwa Sekertaris BPKAD Kota Bandar Lampung diberi tugas oleh pemkot Lampung untuk memberikan sejumlah uang kepada oknum Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Kemudian Sekertaris Bpkad Kota Bandar Lampung juga memberikan fee kepada oknum di DJPK Kementerian Keuangan, untuk menyatakan bahwa kota Bandar Lampung APBD nya layak mendapatkan hutang dari PT. SMI, yang kondisi riilnya, sangat akan membebani APBD Kota Bandar Lampung yang sudah sangat banyak defisitnya.” lanjut sumber. Sedangkan Sekertaris BPKAD membantah saat dikonfirmasi dugaan tersebut, ia berdalih jika Dirjen sulit untuk diajak komunikasi bahkan untuk ditemui. “Informasi itu tidak benar, bagaimana kami melakukan gratifikasi, Dirjen itu di chat WA tidak membalas, ditelpon tidak mengangkat, apalagi mau ditemui,” jelasnya Selasa (29/12/2021). Dia menerangkan, jika perjanjian dengan PT. SMI belum rampung karena belum ada persetujuan dari Kemendagri. “Dan hingga detik ini perjanjian dengan PT. SMI masih belum selesai, dan baru besok (Rabu, 29/12/2021) akan ditandatangani, dan itupun atas kebijakan dari PT.SMI sendiri, karena belum ada persetujuan dari Kemendagri,” tandasnya.

Di dalam penelitian ini, penulis menambahkan variable terikat atau variable dependen (X_2) yaitu Kompetensi, menurut Edison, Yohny & Imas Komariyah, (2017), kompetensi adalah kemampuan individu melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian dan sikap. Berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif, dan sangat jarang atau bahkan tidak pernah melakukan kesalahan. Ditambahkannya variable tersebut agar penulis dan pembaca dapat mengetahui hal lain yang berpengaruh terhadap variable (Y) dan variable (Z) dari penelitian

sebelumnya serta penulis mengikuti saran dari peneliti terdahulu agar ditambahkannya variable didalam penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap efektifitas akuntansi publik serta dampaknya terhadap *Good Governance*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan Kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer, Pengumpulan data menggunakan Kuesioner dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian verifikatif, Skala pengukuran data dengan skala likert dan menggunakan Analisis Path untuk pengujian hipotesis. Sampel penelitian adalah pegawai di BPKAD Kota Bandar Lampung, Responden dalam penelitian ini adalah PNS BPKAD yang terdiri dari beberapa bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, Bidang Pembendaharaan, Bidang Sekertariat di BPKAD Kota Bandar Lampung. Dan juga penelitian ini dapat melatih untuk berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga dapat berguna untuk masa depan.

Berdasarkan uraian berbagai fenomena yang terjadi diatas, tentang budaya organisasi dan kompetensi yang dapat berpengaruh terhadap *good governance* serta bagaimana peran akuntansi publik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik, menjadi dasar yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMPETENSI TERHADAP EFEKTIVITAS AKUNTANSI PUBLIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP *GOOD GOVERNANCE* BPKAD KOTA BANDAR LAMPUNG”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian dilakukan supaya penelitian serta pembahasannya lebih terarah, agar hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan penelitian. Penelitian memiliki ruang lingkup:

1. Penelitian ini menggunakan sample pada BPKAD di Kota Bandar Lampung
2. Penelitian ini hanya meneliti variabel independen yaitu budaya organisasi dan kompetensi dan variabel dependen yaitu efektivitas akuntansi publik dan variabel intervening *good governnace*.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Akuntansi Publik?
2. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Akuntansi Publik?
3. Apakah terdapat pengaruh Budaya Organisasi berpengaruh terhadap *Good Governance*?
4. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi terhadap *Good Governance*?
5. Apakah terdapat pengaruh Efektivitas Akuntansi Publik terhadap *Good Governance*?
6. Apakah terdapat pengaruh Budaya Organisasi melalui Efektivitas Akuntansi Publik terhadap *Good Governance*?
7. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi melalui Efektivitas Akuntansi Publik terhadap *Good Governance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Akuntansi Publik.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensiterhadap Efektivitas Akuntansi Publik.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Budaya Organisasi terhadap *Good Governance*.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi terhadap *Good Governance*.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Efektivitas Akuntansi Publik terhadap *Good Governance*.
6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Budaya Organisasi melalui Efektivitas Akuntansi Publik terhadap *Good Governance*.
7. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kompetensi melalui Efektivitas Akuntansi Publik terhadap *Good Governance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Penerapan Akuntansi Publik terhadap *Good Governance* di Pemerintahan Kota Bandar Lampung.

2. Peneliti

Dalam penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai Pengaruh Budaya Organisasi dan kompetensi terhadap Efektivitas Akuntansi Publik serta dampaknya terhadap *Good Governance*, juga penelitian ini dapat melatih untuk berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga dapat berguna untuk masa depan.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi yang berhubungan dengan peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi skripsi dengan jelas dan terstruktur, berikut sistematika penulisan skripsi tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian tentang “Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Akuntansi Publik Serta Dampaknya Terhadap *Good Governance* Pemerintah Kota Bandar Lampung”.

BAB II: Landasan Teori

Di dalam bab ini menjabarkan secara ringkas tentang teori-teori pada penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis (dugaan sementara).

BAB III: Metode Penelitian

Di dalam bab ini menjelaskan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian, hubungan antar variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Di dalam bab ini penulis menjabarkan dan menguraikan hasil dan pembahasan mengenai Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompetensi terhadap Efektivitas Akuntansi Publik serta Dampaknya terhadap *Good Governance*.

BAB V: Simpulan dan Saran

Di dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan dan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran dan perbaikan bagi pihak bersangkutan.